



LAPORAN KINERJA (LKj)

Acc 14/2-2025



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN SILAUT

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Painan, 26 Februari 2025

Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.

Pembina Tk.I/ IV(b)

NIP. 19780528 200501 2 004



KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'aala atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat kami selesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Silaut. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja(LKj) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Silaut kepada para stakeholders selama Tahun 2024. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Silaut dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.

Silaut, 12 Januari 2025
Camat Silaut,

AFIZEN, S.Sos.
Perangkat Tk. I / III.d
NIP. 197206051993031005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”.

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi keenam. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan** dan misi keenam yaitu **“Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis”**.

Seiring dengan harapan tersebut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional.

MISI 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

TUJUAN 1.1: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.





SASARAN 1.1.1: Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.

SASARAN 1.1.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

SASARAN 1.1.3: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.

SASARAN 1.1.4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari.

MISI 6: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

TUJUAN 6.1: Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis..

SASARAN 6.1.1: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah, Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut:

Tabel 1.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81,0)	A (80,54)	99.43





Laporan Kinerja (LKj)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85.25	100.29
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5,20%	5,10	98.08
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80	80	100
Rata-rata capaian (%)						101

Catatan:*) Data Capaian Tahun 2024

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Rata-rata Pencapaian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk (lima) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Silaut, 12 Januari 2025
Camat Silaut,

APLIZEN S.Sos.
Penata N.I / III.d
NIP. 197206051993031005





DAFTAR ISI

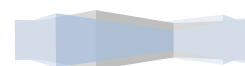
KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSKLUSIF		ii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud Tujuan	1
	1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
	1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama....	5
	1.5. Landasan Hukum	6
	1.6. Sistematika Penyusunan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	9
	2.1. Rencana Strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	9
	2.2. Rencana Kinerja ..	13
	2.3. Perjanjian Kinerja	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	19
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	20
	3.3. Capaian Kinerja	22
	3.4. Realisasi Anggaran	56
BAB IV	PENUTUP	62
Lampiran-Lampiran		





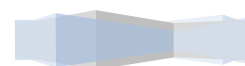
DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	11
Tabel	2.2.	Rencana Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	13
Tabel	2.3.	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
Tabel	2.4.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	16
Tabel	2.5.	Program dan Anggaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	18
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	20
Tabel	3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	20
Tabel	3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024.....	23
Tabel	3.4.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
Tabel	3.5.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	25
Tabel	3.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
Tabel	3.7.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024.....	34
Tabel	3.8.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
Tabel	3.9.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
Tabel	3.10.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	36
Tabel	3.11.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37





Tabel	3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024.....	39
Tabel	3.13.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	40
Tabel	3.14.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	40
Tabel	3.15.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	41
Tabel	3.16.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
Tabel	3.17.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2024.....	44
Tabel	3.18.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	47
Tabel	3.19.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	48
Tabel	3.20.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	49
Tabel	3.21.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
Tabel	3.22.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2024.....	52
Tabel	3.23.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	53
Tabel	3.24.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	54
Tabel	3.25.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	55
Tabel	3.26.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel	3.27.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 yang Menunjang Sasaran Strategis....	57





DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan....	4
	3.1	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.....	26
	3.2	Pemberian Reward dan Punishment kepada Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan.....	27
	3.4	Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023.....	27
	3.5	Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.....	28
	3.6	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	30
	3.7	Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2023	32
	3.8	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2024	34
	3.9	Laporan Inovasi daerah 2023	39
	3.10	SK Bupati Pemberitahuan Data P3KE 2024.....	46





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan



penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Silaut terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.





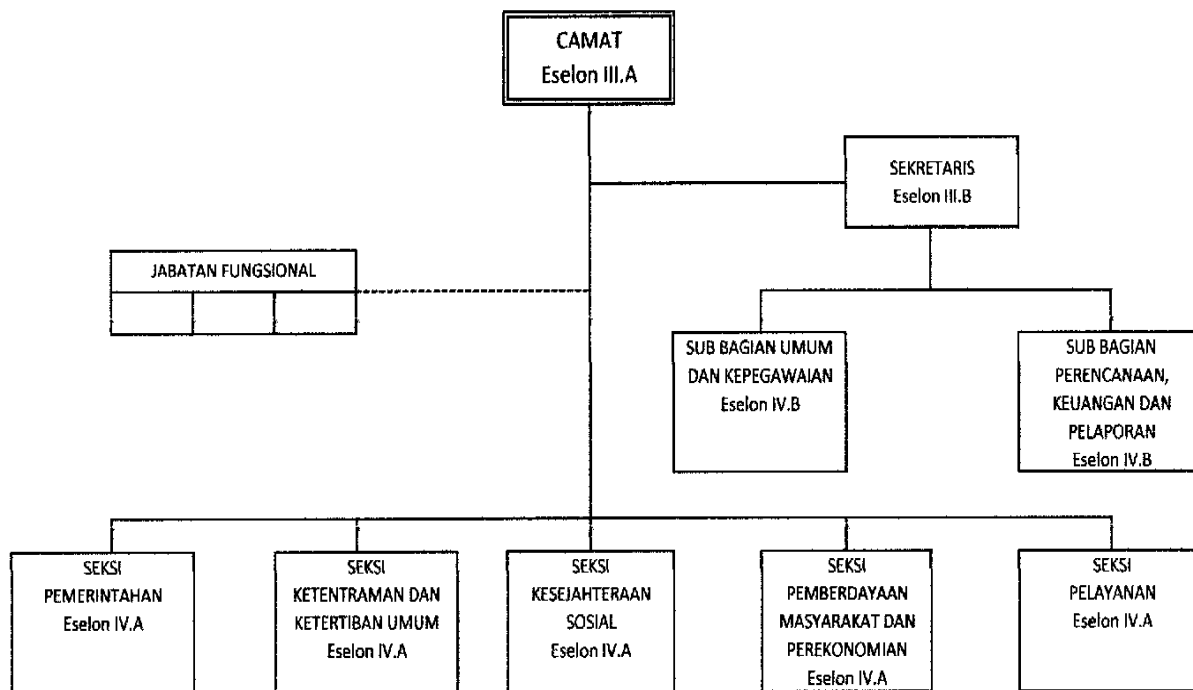
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Harmonisasikan koordinasi tugas camat dengan pemerintah nagari dalam bentuk fasilitasi, rekomendasi maupun koordinasi, diantaranya menyusun peraturan desa/nagari, administrasi tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset, sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa, penetapan lokasi kawasan pembangunan pedesaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya.

Permasalahan Utama

Identifikasi permasalahan

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Hambatan/kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan adanya revisi Program dan Kegiatan yang tidak dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Silaut.
2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang lebih luas oleh ASN sehingga kurangnya inovasi dan hanya bekerja rutinitas saja.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan mutu pelayanan Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai.



Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nagari adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah SDM bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu penambahan jumlah tenaga bidang Pemberdayaan Pemerintah dengan tujuan dapat melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari.
4. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pelayanan di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh karena tidak adanya Diklat, BIMTEK dan lainnya.

Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Kecamatan Silaut dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Camat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

1.5. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021– 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026;

5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan.





BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Silaut tahun 2024 ini dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Rencana Pembangunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:



“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

2.1.2. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2024 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek



dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Silaut telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70)	A (80.43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	82	85	85	85
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	80	75	75	85	85
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	70%	70%	75%	75%	75%
				Angka Kemiskinan Ekstrem	%	-	-	0%	0%	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	-	-	5,20%	5,20%	5,20%
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Silaut dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memberdayakan Masyarakat akan standar dengan penting nya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparaturnya yang profesional dan handal melalui pengembangan SDM (melalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.



7. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.
9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdayaguna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2024 pada Kecamatan Silaut dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2024 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja PD.

2.2. RENCANA KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Rencana Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Tujuan	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81,0)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85



		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%
			Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5,20%
5.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Analisis Situasi:** Pahami kondisi saat ini dari Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.
2. **Penetapan Tujuan:** Tentukan Tujuan yang jelas untuk Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang akan membimbing penetapan target.
3. **Tujuan Strategis:** Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
4. **Indikator Kinerja:** Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan – tujuan tersebut.
5. **Target Spesifik:** Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
6. **Rencana Aksi:** Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
7. **Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.



Adapun Indikator Kinerja Utamadan target capaian selama satu tahun Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah Kab. Pessel	A(81,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	85
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Hasil Kematangan Inovasi Kecamatan dari aplikasi iga2022.silaut.kebuapaten.pesisir.selatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$	75%
				Angka Kemiskinan Ekstrim	Data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	$\frac{\sum \text{Balita stunting}}{\sum \text{Balita yang diukur}} \times 100\%$	5,20%
2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Seluruh Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	80%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024



2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Silaut. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2024, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,0)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75



4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5,20%
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025, diolah

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Silaut oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target dihitung berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan Silaut Tahun 2024;
- Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, target dihitung berdasarkan jumlah Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dibagi Jumlah Seluruh Nagari dikali 100;
- Angka Kemiskinan Ekstrim, target dihitung berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPTPS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024;
- Prevalensi Stunting (Eppgbm), target dihitung berdasarkan jumlah Balita Stunting dibagi Jumlah Balita yang diukur dikali 100, data diambil dari Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut;



- g. Persentase Konflik Yang Diselesaikan, target dihitung berdasarkan jumlah konflik yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik yang dilaporkan.

Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.

Program dan Anggaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.916.415.388	2.103.077.539
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49.800.000	59.650.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	97.020.500	79.862.800
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.144.500	5.506.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.786.000	23.407.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.072.000	10.938.000
	J U M L A H	2.160.238.388	2.282.441.339

Sumber: DPA-SKPD Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

3.1. METODOLOGIPENILAIANCAPAIANTARGETKINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.



Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawahini :

Tabel3.1

KlasifikasiPenilaian danKategoriPenilaianKeberhasilan/Kegagalan
PencapaianSasaranStrategis dan CapaianIndikator KinerjaTahun2024

No	KlasifikasiPenilaian	Predikat
1	85% - 100%	SangatBaik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Kurang Baik

Sumber:PermendagriNomor86Tahun2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukurancapaian target indikatorkinerjautama5 (lima)sasaranstrategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

HasilPengukuranPerjanjianKinerjaKecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2024			
				TARGET	REALISASI	(%)	
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN.							
Tujuan 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.							
1.1.1	TerwujudnyaPemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81.0)	A (80.54)	99.43
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85.25	100.29



	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		6.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5.20%	5.10%	98.08
MISI 6 : MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS.							
Tujuan 6.1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tenteram Dan Dinamisin.							
6.1.1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	7.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	80%	100
Rata-rata Capaian Indikator 5 Sasaran Strategis : 7 Indikator Kinerja							101

Catatan :*)Data Capaian Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 7 (tujuh) indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

1) Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A(81.0).

Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah adalahA (80.54) dengan capaian kinerjasebesar 99,43% denganpredikats**sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bias diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 85.

Capaian indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut adalah 85.25 atau sebesar 100,29% dengan predikat **sangat baik**.



- 3) Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan dengan target 75%.
Capaian indicator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut adalah 70% atau sebesar 116% dengan predikat **sangat baik**.
 - 4) Nilai Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dengan target 75%.
Capaian indicator Nilai Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik adalah 70% atau sebesar 93.33% dengan predikat **sangat baik**.
 - 5) Nilai Angka Kemiskinan Ekstrem dengan target 0%.
Capaian indicator Nilai Nilai Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 0% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.
 - 6) Nilai Prevalensi Stunting (Eppgbm) dengan target 5.20%.
Capaian indicator Nilai Nilai Prevalensi Stunting (Eppgbm) adalah 5.10% atau sebesar 98.08% dengan predikat **sangat baik**.
 - 7) Nilai Persentase Konflik Yang Diselesaikan dengan target 80%.
Capaian indicator Nilai Prevalensi Stunting (Eppgbm) adalah 5.10% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.
- Capaian rata-rata ke 7 (tujuh) indicator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 101% dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIANKINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indicator kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja persasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indicator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah.



a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81.0)	A (80.54)	99.43
Rata-rata capaian (%)						99.43

Catatan:*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB(70)	A (80,43)	A (81,0)	A (80,43)	A (80,54)	A (80,54)	114%	100%	99.43%

Catatan:*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.4 menggambarkan bahwa peningkatan nilai Evaluasi LKj Kecamatan Silaut pada komponen perencanaan kinerja tahun 2022-2024 adalah dari segi realisasinya nilai Evaluasi LKj Kecamatan Silaut pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami peningkatan yaitu dari nilai 80,43 pada tahun 2022 naik menjadi 80,54 pada tahun 2023.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,54)	A (81,0)	99,43	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan:*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indicator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas:

- a) Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja(Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - c) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
 - d) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/>





Gambar 3.1 :Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Kecamatan Silaut selama Tahun 2024 belum memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan.

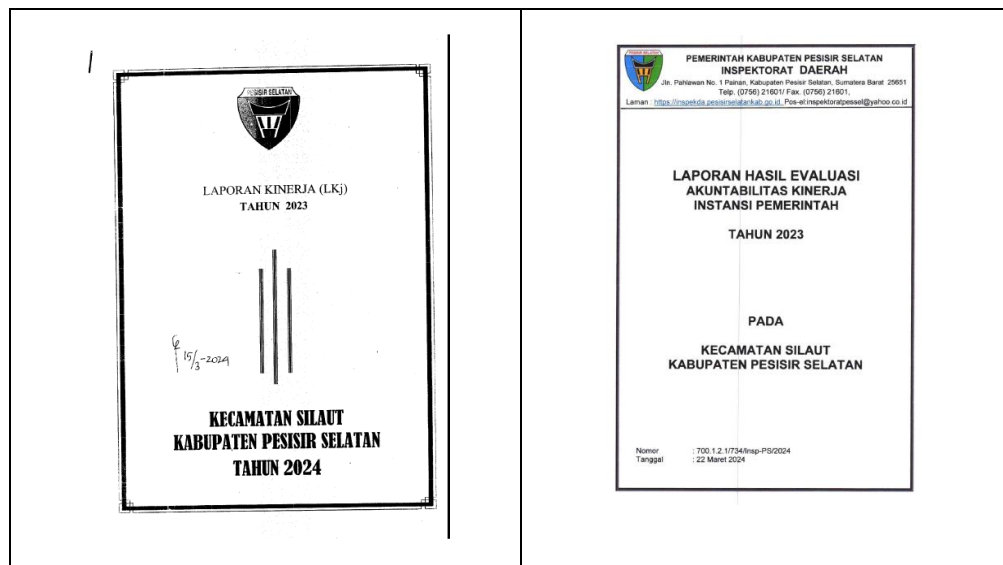
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga memberikan **reward** dan **punishment** terhadap kinerja perangkat daerah Tahun 2023 yang diserahkan pada awal Tahun 2024. Kecamatan Silaut memperoleh peringkat **Terbaik I** tingkat Kecamatan Atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.



Gambar 3.2 :Pemberian Reward dan Punishment kepada Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikanke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukanrevisi oleh Inspektorat Daerah KabupatenPesisir Selatan.



Gambar3.4: Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKjT ahun 2023

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

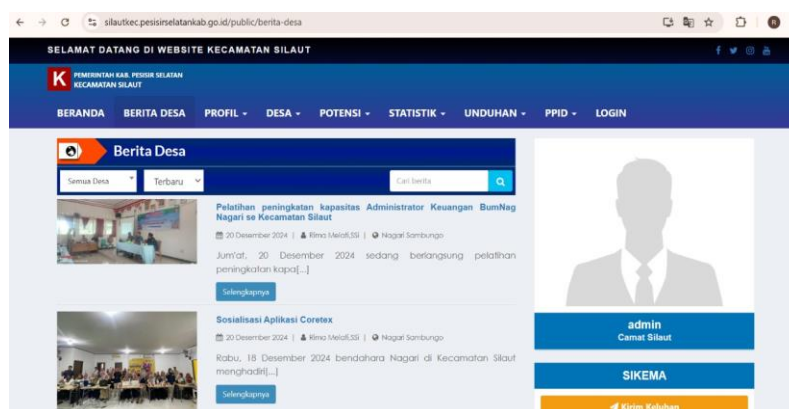
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodic melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5: Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Semua pelaksanaan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten selama Tahun 2024 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Website Kecamatan Silaut : <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/>



2. Facebook :



Kecamatansilaut15



3. Instagram



Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media social untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2024.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya memuat analisis atas efisiensi sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



Tabel 3.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81.0)	A (80.54)	99.43	20.268.100,00	13.156.500,00	64.91	34,71

Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 34,71%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Tahun 2024 adalah A (81.0), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2023 sebesar A (80,54) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,43%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,11% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A(80,43).

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SILAUT
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	25,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,26	20,12
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,00	12,19
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,67	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,43	80,54
			A	A

Gambar 3.6: Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023



Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:

- a. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya;
- b. Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya;
- c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.

2. Pengukuran Kinerja

Lakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pengukuran pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran agar capaian kinerja tahun berikutnya lebih baik.

3. Pelaporan Kinerja

Melengkapi dokumen Laporan Kinerja pada BAB III dengan menyajikan informasi:

- 1) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra) secara memadai.
- 2) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) jika ada.
- 3) Analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja secara memadai.
- 4) Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada aspek penggunaan SDM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, Waktu, dll) secara memadai.



4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan Pemantauan Capaian Kinerja Internal dengan membuat laporan monev yang menyajikan informasi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - Target kinerja;
 - Realisasi kinerja;
 - Faktor pendorong;
 - Faktor hambatan; dan
 - Rekomendasi (saran perbaikan)
- b. Menjadikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

**MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI
KECAMATAN SILAUT**

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
1.	Perencanaan Kinerja							
	Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:							
1.	Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya;	1. Telah dilakukan monitoring secara periodik (bulanan, triwulan, semester) terhadap capaian target dalam rencana aksi yang dilaksanakan oleh masing-masing kasi/kasubag/staf.	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	
2.	Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya; unit dibawahnya secara berjenjang	2. Telah dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya unit dibawahnya secara berjenjang terhadap deviasi atas aksi yang dilaksanakan	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	
3.	Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.	3. Telah dibuat mekanisme untuk mengetahui progress kerja yang terbaru	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	Camat Silaut	Dalam proses	Sekretaris Kecamatan	

Gambar3.7: Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2023



g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- l. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari:
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.156.500,00 atau 64,91% dari total anggaran sebesar Rp.20.268.100,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 35,09%.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini:



Tabel 3.7

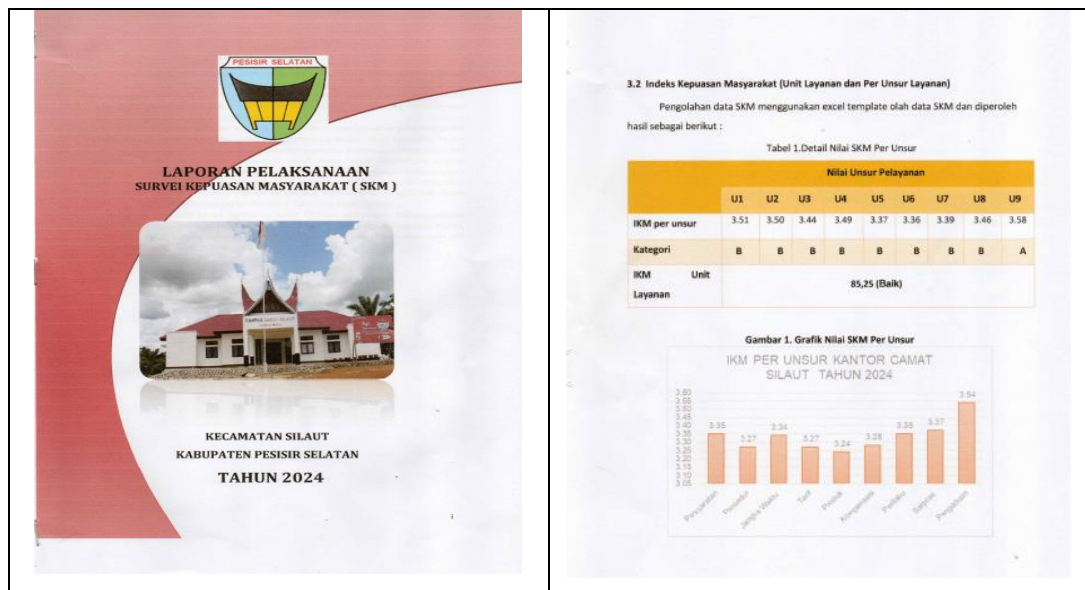
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85.25	100.29
Rata-rata capaian (%)						100.29

Sumber: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2024

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut mencapai 85,25 dari target 85,00 atau tingkat capaiannya mencapai 100,29%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil survey kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik pada unit penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Kecamatan Silaut. Dimana tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan publik.



Gambar 3.8: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2024



b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	82	85	80	82.55	85.25	100%	100%	100.29 %

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,7% dari 82,55 pada Tahun 2023 menjadi 85,25 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:



Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.25	85	100.29%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85.25	100.29	Tidak tercapainya nilai unsur pelayanan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.	Meningkatkan sarana dan prasarana seperti: Menyediakan spanduk standar pelayanan dan menyediakan sarana bermain anak.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.11

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85.25	100.29	59.650.000,00	56.395.100,00	94.54	5.73%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran} / \text{rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran} / \text{rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber day asebesar 5.73%.

Upaya peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana ruang bermain anak;
2. Menyediakan spanduk standar pelayanan.



g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan terdiri dari :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.56.395.100,00 atau 94,54% dari total anggaran sebesar Rp.59.650.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 5,46%.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini:



Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116
Rata-rata capaian (%)						116

Sumber: Laporan Inovasi daerah 2023

Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut mencapai 87,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannyamencapai 116,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan” dengan predikat **tinggi** yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. Inovasi ini membantu memfasilitasi masyarakat yang telah terlanjur berkegiatan ekonomi di dalam kawasan Hutan yang dahulunya ilegal atau tidak resmi menjadi Legal atau resmi.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGIS KEBERLAKUAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor Register: 13.01-399784-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan

1.2. Dibuat Oleh
Kecamatan Silaut (19/2022 silaut.kabupaten.pesisir.selandan)

1.3. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah
OPD

1.5. Nama Inisiator
Pemerintah Kecamatan Silaut

1.6. Jenis Inovasi
Non Digital

1.7. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.8. Tematik
Non Tematik

1.9. Urusan Inovasi Daerah
lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Hutan adalah suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2)
Kawasan Hutan Adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berisikan lingkungan hutan di dalamnya jadi Jenis yaitu:

1.11. Tujuan Inovasi Daerah
Memfasilitasi Masyarakat yang telah terlanjur berkegiatan di kawasan Hutan agar Aktivitas Masyarakat tersebut bisa legal secara Hukum

1.12. Manfaat Yang Diperoleh
Memfasilitasi Masyarakat yang berkebun di kawasan hutan dan legalitas masyarakat yang sudah terlanjur berkegiatan ekonomi selama 5 tahun secara terus menerus di dalam kawasan Hutan Se-Kecamatan Silaut dengan dilakukannya SK. Melompok Masyarakat yang Berkebun di Kawasan Hutan

1.13. Hasil Inovasi
Terfasilitasinya masyarakat yang telah terlanjur berkegiatan atau berkebun di dalam kawasan hutan di sekitar Kecamatan Silaut untuk mendapatkan izin atau legalitas dengan di terbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pemberian persetujuan pengalihan hutan desa kepada kelompok Masyarakat Desa sebagai bahan acuan legalitas Masyarakat untuk berkegiatan di kawasan hutan sekitar kecamatan Silaut

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah
02-01-2023

1.15. Waktu Implementasi
01-05-2023

1.16. Anggaran
<https://static2024.naturedovention.com/wdffe653474274d7e709465230d9507a153213eeeb5.pdf>

1.17. Profil Bisnis
-

1.18. Dokumen HAKI
-

1.19. Penghargaan
-

1.20. Kematangan
87.00

Gambar 3.8: Laporan Inovasi daerah 2023



b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	80	75	75	97	85	87	121%	113%	116%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2% dari 85,00 pada Tahun 2023 menjadi 87,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	87	75	116%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indicator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikat or Kinerj a	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	AnalisisKeber hasilan/ Kegagalan	SolusiYang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Kecamatan Silaut dikarenakan masih bersifat manual/konvensional, belum terintegrasi, kemanfaatan inovasinya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain.	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh Daerah lain.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel3.16

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran(Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	87	116	4.754.000,00	1.689.200,00	35.53	69.36

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumberdaya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 69.36%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

3. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
4. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
5. Manajemen inovasi;dan
6. Keberlanjutan inovasi.



g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

II. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.689.200,00 atau 35,56% dari total anggaran sebesar Rp.4.754.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 64,44%.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari dengan Indikator Kinerja:

- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
- Angka Kemiskinan Ekstrim
- Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
2. Angka Kemiskinan Ekstrim
3. Prevalensi Stunting (Eppgbm)



a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini:

Tab 13.17
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan
Pemerintahan Nagari Tahun 2024

No	Sasaran	IndikatorKinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5.20%	5.10%	98.08
Rata-rata capaian(%)						100.29

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.17 diatas dapat dijelaskan bahwa.

1. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik mencapai 70% dari target 75% atau tingkat capaiannya mencapai 99,33%.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APBNagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan



disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

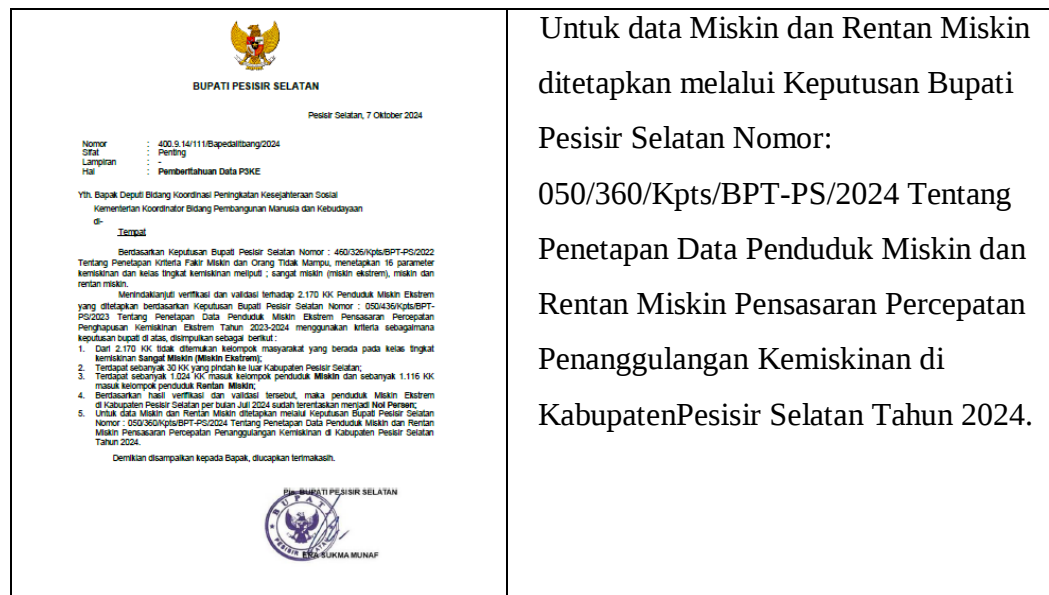
Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui



pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

2. Realisasi capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim mencapai 0% dari target 0% atau tingkat capaiannya mencapai 100%.

Angka Kemiskinan Ekstrim merupakan penilaian terhadap Hasil verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.



Gambar 3.10: SK Bupati Pemberitahuan Data P3KE 2024

3. Realisasi capaian indikator Prevalensi Stunting (Eppgbm) mencapai 5.10% dari target 5.20% atau tingkat capaiannya mencapai 98,38%.

Prevalensi Stunting merupakan presentase dari jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah balita diukur dikali 100, data stunting ini didapatkan dari laporan Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan





LAPORAN RPJMN BULAN DESEMBER

Data Tanggal : 2024-12-31 10:02:05

No	PUSKESMAS	Stunting			Wasting			Overweight		Underweight			SUPLEMENASI GIZI MIKRO			
		Jumlah Balita diukur	Jumlah Balita Stunting	Persentase stunting	Jumlah Balita ditimbang dan	Jumlah Balita Wasting	Persentase Wasting	Jumlah Balita Overweight	Persentase Overweight	Jumlah Balita Ditimbang	Jumlah Balita Underweight	Persentase Underweight	Jumlah taburita diterima Puskesmas	Target Sasaran Balita Meneria	Jumlah Sasaran (Underweight)	Jumlah Mendapat Taburita
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
1.	TANJUNG MAKMUR	1148	59	5,1%	1148	27	2,4%	26	2,3%	1148	69	6%	0	0	0	0
Jumlah		1148	59	5,1	1148	27	2,4	26	2,3	1148	69	6	0	0	0	0

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrem, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	70%	70%	75%	70%	70%	70%	100%	100%	93.33%
2.	Angka Kemiskinan Ekstrem	%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	100%
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	-	-	5,20%	-	-	5,10%	-	-	98.08%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik Tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 70%.



2. Realisasi Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 0% dengan capaian kinerja 100%, untuk tahun 2022 dan 2023 tidak ada target dan realisasi yang dicapai.
3. Realisasi Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 5.10% dengan capaian kinerja 98,08%, untuk tahun 2022 dan 2023 tidak ada target dan realisasi yang dicapai.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini:

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93.33	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
2.	Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5.20%	5.10%	98.08	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak



dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini:

Tabel 3.20

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	75%	70%	93.33	- Tersedianya data digital di pemerintahan Nagari. - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Nagari	- Meningkatkan SDM Pemerintah Nagari - Mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan Nagari
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	100	- Kurangnya Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Belum maksimal Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.	- Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Persen	5.20%	5.10%	98.08	- Kurangnya Akses ke Nutrisi yang Cukup dan Seimbang - Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan - Masalah Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	- Meningkatkan Akses dan Kualitas Gizi dan Pendidikan Gizi dan - Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak - Perbaikan Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.21

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran(Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran(Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93.33	6.184.000,00	5.870.000,00	94,92	-1.7
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100	79.862.800,00	58.656.500,00	73,45	-8.6
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5.20%	5.10%	98.08				

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumberdaya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensisumberdaya pada indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik sebesar-1.7%.

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumberdaya pada indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim dan Prevalensi Stunting (Eppgbm) sebesar - 8.6%.



g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Kegiatan terdiri dari :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan terdiri dari:
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik adalah sebesar Rp.5.870.000,00 atau 94,92% dari total anggaran sebesar Rp.6.184.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 5,09%.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrem dan Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.58.656.500,00 atau 73,45% dari total anggaran sebesar Rp.79.862.800,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 26,55%.

ASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Konflik Yang Diselesaikan.



a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini:

Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80	80	100
Rata-rata capaian (%)						100

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa.

1. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Konflik Yang Diselesaikan mencapai 80% dari target 80% atau tingkat capaiannya mencapai 100%.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, budaya, serta tata nilai kehidupan masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban Umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan



manifestasi dari hakasasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan oleh masyarakat Kecamatan Silaut Tahun 2023 sebanyak 3 kasus dan telah diselesaikan dengan baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100	100	100%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.23 diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 80%.



c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini:

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	80%	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini:



Tabel 3.25
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	Persen	80%	80%	100	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Memperkuat peran siskamling dan pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya memuat analisis atas efisiensi sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.26
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	80%	100	28.913.000,00	18.962.000,00	65,58	34,6

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumberdaya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumberdaya pada indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan sebesar 34,6%.



g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan terdiri dari:
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- II. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan terdiri dari:
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.18.962.000,00 atau 65,58% dari total anggaran sebesar Rp.28.913.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 34,42%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut dengan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024, tercantum pada tabel 3.27 dibawah ini:





Tabel 3.27
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024
yang Menunjang Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	KET.
12	3	3			4	10	9		11
KECAMATAN SILAUT						2.282.441.339	1.961.862.953	85.95	
1. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	A (81,0)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.103.077.539	1.820.290.153	86.55	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.268.100	13.156.500	64.91	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.669.950	6.311.750	54.09	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.598.150	6.844.750	79.61	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.546.641.339	1.370.359.694	88.60	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.441.339	1.324.159.694	88.25	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.200.000	46.200.000	100.00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.696.806	219.907.080	73.13	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.110.620	5.110.620	100.00	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.864.010	25.864.010	100.00	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.911.176	4.404.500	74.51	



Laporan Kinerja (LKj)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.704.000	10.780.000	92.11	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.107.000	173.747.950	68.92	
				Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.609.266	78.850.295	94.31	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.179.266	64.420.295	93.12	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	14.430.000	14.430.000	100.00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.261.370	48.933.784	91.87	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.021.000	6.904.900	76.54	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.240.370	42.028.884	95.00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.600.658	89.082.800	90.35	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.640.658	48.122.800	83.49	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	5.400.000	100.00	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.560.000	35.560.000	100.00	



Laporan Kinerja (LKj)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.650.000	56.395.100	94.54	
					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.650.000	56.395.100	94.54	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.650.000	56.395.100	94.54	
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3.Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan.	-	-	75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.938.000	7.559.200	69.11	
					Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.938.000	7.559.200	69.11	
					Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.754.000	5.870.000	123.47	
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	4.Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	75%	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.184.000	1.689.200	27.32	
	5.Angka Kemiskinan Ekstrem	-	-	0%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	79.862.800	58.656.500	73.45	
	6.Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	5,20%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.862.800	58.656.500	73.45	
					Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.813.800	10.805.300	99.92	
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.049.000	47.851.200	69.30	



Laporan Kinerja (LKj)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

5. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	7. Persentase Konflik Yang Diselesaikan	-	-	80%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.506.000	3.652.000	66.33	
					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.506.000	3.652.000	66.33	
					Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.506.000	3.652.000	66.33	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.407.000	15.310.000	65.41	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.407.000	15.310.000	65.41	
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.230.000	6.723.000	92.99	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.177.000	8.587.000	53.08	

Sumber: Bagian Keuangan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafonanggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.2.282.441.339,- terealisasi sebesar Rp. 1.961.862.953,-atau85,95%.
Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5(lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp.320.578.386,- atau 14,05% .
- b. Sisa anggaran sebesar Rp320.578.386,-atau 14,05% mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indicator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 101% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 116% yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.
2. Capaian Indikator Kinerja Jika dilihat dari realisasi 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target A (81,0). Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah A (80,54) atau sebesar 99,43% dengan predikat **sangat baik**, Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
 - b. Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan target 85. Capaian indikator Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah 85,25 atau sebesar 100,29% dengan predikat **sangat baik**.
 - c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan dengan target 75. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut adalah 87 atau sebesar 116% dengan predikat **sangat baik**.
 - d. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dengan target 75%. Capaian indikator Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik adalah 70% atau sebesar 99,33% dengan predikat **sangat baik**.



- e. Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem dengan target 0%. Capaian indikator Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 0% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.
- f. Persentase Prevalensi Stunting (Eppgbm) dengan target 5.20%. Capaian indikator Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 5.10% atau sebesar 98,09% dengan predikat **sangat baik**.
- g. Persentase Konflik Yang Diselesaikan dengan target 80%. Capaian indikator Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 80% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 101% dengan predikat **sangat baik**.

- 2. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Silaut tahun 2024 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis dialokasikan sebesar Rp2.282.441.339,- terealisasi sebesar Rp1.961.862.953,- atau 85,95%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Silaut yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Silaut secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
- 2. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Silaut dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;





3. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Silaut agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Silaut.



Dokumen Pendukung
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**BERITA ACARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KENIRJA TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai Pemberian Penghargaan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, telah mengadakan rapat dengan keputusan rapat sebagai berikut:

1. Menetapkan peringkat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 perangkat daerah se kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	89,94	A
4.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,93	A
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A
6.	Dinas Perhubungan	89,85	A
7.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89,71	A
8.	Dinas Kesehatan	89,68	A
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,31	A
10.	Dinas Pertanian	88,92	A
11.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,84	A
12.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87,97	A
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,43	A

14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,49	A
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	84,64	A
16.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84,54	A
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,72	A
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,65	A
19.	Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	82,39	A
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,9	A
21.	Dinas Perikanan dan Pangan	81,46	A
22.	Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,14	A
23.	Kantor Kecamatan IV Jurai	80,92	A
24.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	A
25.	Kantor Kecamatan Silaut	80,54	A
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	80,44	A
27.	Kantor Kecamatan Batang Kapas	80,34	A
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,31	A
29.	Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan	80,24	A
30.	Sekretariat Daerah	80,16	A
31.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,16	A
32.	Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	80,16	A
33.	Kantor Kecamatan Lunang	78,86	BB
34.	Kantor Kecamatan Bayang	78,8	BB
35.	Kantor Kecamatan Airpura	78,32	BB
36.	Kantor Kecamatan Pancung Soal	76,22	BB

37.	Kantor Kecamatan Lengayang	76,17	BB
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,72	BB
39.	Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	74,21	BB
40.	Kantor Kecamatan Sutera	72,48	BB
41.	Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti	65,78	B

2. Menetapkan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan peringkat I, II dan III, sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A
3.	Inspektorat Daerah	89,94	A

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Penanggung Jawab,
Inspektur

Rusliyanto, S.H., M.Hum.
Pemula Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik periode Januari – Juni Tahun 2024 pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan untuk mengkaji tingkat atau Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan yang diberikan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan ini memuat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan publik pada unit penyelenggara layanan publik di lingkungan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, maka unit penyelenggara layanan publik sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil dari survei diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Silaut, 24 Desember 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BABI	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	3
PENGUMPULAN DATA SKM	3
2.1 Pelaksana SKM	3
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden	5
BAB III	6
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	6
3.1 Jumlah Responden SKM	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	9
BAB V	11
KESIMPULAN	11
LAMPIRAN.....	12
1. Kuesioner.....	12
2. Hasil Pengolahan Data	13
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam melaksanakan amanat UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Silaut sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan public untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga Negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Silaut.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Silaut dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Silaut adalah tim pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Silaut yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	8
2.	Pengumpulan Data	Februari - Mei 2024	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2024	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli - September 2024	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Silaut. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik *simple random sampling*, yaitu dengan cara responden dipilih secara acak (*random*) pada saat melakukan kunjungan pada masing – masing jenis pelayanan. Agar responden yang dijadikan sampel dapat mewakili populasinya maka jumlah responden yang ditetapkan sebagai sampel sebesar 150 orang. Survei dilakukan dikantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode januari – juni 2024 diperoleh 150 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENISKELAMIN	LAKI	77	51 %
		PEREMPUAN	73	49%
2	PENDIDIKAN	SDKE BAWAH	0	0 %
		SLTP	12	8 %
		SLTA	97	95 %
		DIII	0	0 %
		SI	40	27 %
		S2	1	1 %
3	PEKERJAAN	PNS	0	13,3%
		TNI	0	0%
		SWASTA	27	18%
		WIRSAUSAHA	129	86 %
		LAINNYA/PETANI	11	7%
4	JENISLAYANAN	LEGALISASI SURAT MENYURAT BERKAITAN PELAYANAN	67	45%
		LEGALISASI SURAT MENYURAT BERKAITAN PEMERINTAHAN	24	16%
		LEGALISASI SURAT MENYURAT BERKAITAN KESEHJATERAAN MASYARAKAT	28	19%

		LEGALISASI SURAT MENYURAT BERKAITAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN	27	18%
		LEGALISASI SURAT MENYURAT BERKAITAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	4	5%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.51	3.50	3.44	3.49	3.37	3.36	3.39	3.46	3.58
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	85,25 (Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi adalah unsur Pengaduan pelayanan no.9 yaitu pengaduan dalam pelayanan yaitu 3,58. Hal ini menunjukkan bahwa kewajaran prosedur pelayanan sudah baik karena termasuk standar pelayanan. Sehingga masyarakat dapat menggunakan dan menikmati pelayanan yang ada.

Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur no.6 yaitu Kompensasi pelayanan dengan nilai rata-rata 3,36. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk mendapatkan pelayanan, menyebabkan pelayanan kepada pengguna layanan kurang optimal.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Kompetensi“ Masih kurangnya kompetensi Pelayanan masih kurang pelatihan serta masih kurangnya penerapan pemberian penghargaan pelaksana pelayanan”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana pelayanan , untuk pelayanan sudah dilakukan sesuai standar namun ada beberapa yang permasalahan seperti belum adanya sistem antrian elektronik yang membuat pelayanan masih belum terkendali optimal.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Bersama perwakilan pengguna Layanan yang dilakukan pada bulan Juli 2024 . Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW	TW	TW	TW	
			I	II	III	IV	
1	Sarana dan Prasarana	1. Menyediakan Spanduk Standar Pelayanan		√	√	√	Camat
		2. Menyediakan Sarana Ruang Bermain Anak		√	√	√	Camat

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Oktober hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sudah **Baik** dengan nilai SKM 85.25.
- Unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi adalah unsur no. 9 yaitu Pengaduan dengan nilai rata-rata 3,58
- Unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur no. 6 yaitu Kompensasi dengan nilai rata-rata 3,36

Silaut, 24 Desember 2024



LAMPIRAN

1. Kuesioner

CONTOH KUESIONER

KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN IV JURAI

Tanggal : / /		Waktu : ☐ 08.00 – 12.00* ☐ 13.00 – 17.00*	
Jenis Layanan yang diterima :			
Profil Responden			
Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P		Usia : Tahun	
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3			
Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ Polri ☐ Swasta ☐ Wirausaha			
☐ Lainnya :			

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayannya. 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. 1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan 1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. 1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana 1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai	
SARAN DAN MASUKAN :	

2. Hasil Olah Data SKM

NO URUT	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT PERUNSUR LAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	3	4	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	4	3	3	3	3	3	4
6	3	3	3	3	3	3	4	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	3	4	4	4	3	4	4	3
9	3	3	3	3	4	4	4	4	3
10	3	3	4	3	4	3	4	4	4
11	4	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	3	3	3	3	3	3	3	4
13	3	3	3	3	3	4	3	4	4
14	3	3	3	4	3	3	4	3	3
15	3	4	3	4	3	3	3	4	3
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	3	4	3	3	4	3	3	3	3
19	3	3	4	3	3	3	4	4	4
20	3	4	4	3	3	4	4	4	3
21	4	4	4	3	3	4	3	4	3
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3
23	4	4	4	3	4	3	4	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	4	3	4
27	3	4	3	3	3	4	3	4	3
28	3	4	4	4	3	4	4	3	4
29	3	3	4	4	4	4	4	3	4
30	3	3	3	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	4	4	4
32	4	3	4	3	4	3	3	3	3
33	3	3	4	3	4	3	3	3	3
34	3	4	4	4	3	3	4	4	3
35	4	3	4	4	4	3	3	3	3
36	4	3	3	3	3	4	4	3	4
37	4	4	4	3	4	3	4	4	4
38	4	3	4	3	4	3	4	3	3
39	3	3	3	4	3	4	3	3	4
40	3	3	3	3	3	4	3	3	3

41	4	4	4	4	4	3	4	3	4
42	4	4	3	4	3	4	3	4	4
43	3	4	3	4	4	3	3	4	4
44	4	4	3	4	4	4	3	3	4
45	3	4	3	4	3	3	3	4	4
46	4	4	3	4	3	3	3	3	4
47	4	4	4	4	4	3	3	3	4
48	4	4	3	4	3	3	3	3	3
49	4	4	3	4	4	3	4	4	4
50	4	4	4	4	4	3	4	4	3
51	3	4	3	4	3	3	3	3	3
52	4	4	3	4	3	3	3	3	3
53	4	3	3	4	3	3	3	3	4
54	4	4	3	4	3	3	3	3	3
55	4	4	3	4	3	3	3	3	3
56	3	4	4	4	3	3	3	3	3
57	4	4	3	4	3	4	3	3	4
58	4	4	3	4	3	3	3	3	4
59	3	4	3	4	3	3	3	3	3
60	4	4	3	4	4	3	3	4	4
61	4	4	3	4	4	4	3	4	3
62	3	4	4	4	4	4	3	4	4
63	3	4	3	4	4	3	3	4	4
64	4	3	4	4	4	3	3	4	4
65	3	3	3	3	3	4	3	3	3
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	4
70	3	3	4	3	3	4	3	3	4
71	3	3	4	3	3	4	4	4	3
72	3	4	4	4	3	3	4	4	4
73	3	3	3	3	3	3	3	3	4
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3
75	4	4	3	4	3	3	3	4	3
76	4	3	3	4	3	3	3	4	3
77	4	3	4	3	3	3	4	4	3
78	4	4	3	4	4	3	4	4	4
79	3	3	2	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3	3	4
82	4	4	3	3	3	4	3	3	4
83	4	3	4	4	4	3	3	4	4
84	4	4	4	4	4	3	4	3	4

85	3	3	3	3	3	3	3	3	4
86	3	3	3	3	3	3	3	3	4
87	4	4	4	4	3	4	4	4	4
88	4	3	4	3	3	4	4	3	4
89	4	4	4	4	3	4	4	4	4
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3
91	3	4	3	3	4	4	3	3	4
92	3	3	3	3	3	3	3	3	4
93	4	4	4	4	4	3	3	3	3
94	4	4	4	3	4	3	4	4	3
95	3	4	3	3	3	3	3	4	3
96	3	4	4	3	3	4	3	4	3
97	4	3	4	3	3	4	3	4	4
98	4	4	4	3	3	4	3	3	4
99	4	3	4	3	3	4	3	3	4
100	4	4	3	4	3	4	4	4	4
101	4	3	3	3	3	3	3	3	3
102	4	3	4	3	3	3	3	3	4
103	4	4	3	3	3	4	3	4	4
104	4	3	4	3	3	4	4	4	3
105	3	3	3	3	3	3	3	3	4
106	3	4	4	3	4	4	4	4	3
107	3	4	4	3	3	3	3	3	3
108	4	4	4	4	4	3	3	4	3
109	4	3	4	3	4	3	4	4	4
110	4	4	4	3	4	3	4	4	4
111	4	4	4	3	4	3	4	3	4
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3
113	4	4	4	4	4	3	4	3	4
114	3	4	3	4	3	3	3	3	3
115	4	4	4	4	4	3	4	4	4
116	3	4	3	4	3	3	4	4	4
117	4	4	3	3	4	4	3	3	3
118	3	3	4	3	4	3	3	4	4
119	4	3	3	3	3	3	3	3	3
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3
121	3	3	3	3	3	3	3	3	4
122	4	3	4	3	4	3	4	3	3
123	3	3	3	3	4	4	4	4	4
124	4	4	4	3	4	3	3	4	3
125	4	4	3	4	4	3	4	4	4
126	4	3	3	3	3	4	3	4	3
127	3	3	3	3	3	3	3	3	3
128	3	3	3	3	3	3	3	3	4

129	4	3	3	3	3	3	3	3	3
130	3	3	4	4	4	4	3	3	3
131	4	3	3	3	3	3	3	3	4
132	4	4	3	3	4	3	3	3	4
133	3	3	3	3	3	3	3	3	4
134	3	4	4	4	4	3	4	4	3
135	4	4	3	4	3	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	3	3	4	3	4	4	4	4
138	3	3	3	4	3	3	3	3	4
139	3	4	4	4	4	4	4	3	4
140	4	3	4	3	3	4	3	4	3
141	3	3	3	4	3	4	4	3	4
142	3	3	4	4	4	3	4	4	4
143	4	4	4	4	3	4	3	4	3
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3
145	3	3	4	4	3	3	3	4	3
146	3	3	3	4	3	4	4	4	3
147	4	4	4	4	4	4	4	4	3
148	4	3	4	3	4	4	3	3	4
149	3	3	3	3	3	3	3	3	4
150	4	4	3	4	3	4	4	3	4
JumlahNilai Per Unsur	3	3	3	3	3	3	3	3	4
NRR Perunsur	4	4	3	4	3	4	4	3	4
NRR Tertimbang Perunsur	527	525	516	523	506	504	508	519	537
IKM Kecamatan Batang Kapas	3.51	3.50	3.44	3.49	3.37	3.36	3.39	3.46	3.58

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SK



Silaut, 24 Desember 2024





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor Registrasi: 13.01-109786-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan

1.2. Dibuat Oleh

Kecamatan Silaut (iga2022.silaut.kabupaten.pesisir.selatan)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Pemerintah Kecamatan Silaut

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Tematik

Non Tematik

1.9. Urusan Inovasi Daerah

lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2)

Kawasan Hutan Adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. dan berdasarkan fungsinya hutan di bagi menjadi 3 jenis yaitu:

1.Hutan Konservasi yaitu fungsi pokok ditunjukkan untuk pengawetan kekayaan flora ,fauna& ekosistem alam unik & rentan punah

2.Hutan Lindung yaitu fungsi pokok sebagai pencegah bencana banjir,pengantar utama tata air,pengendali erosi,pemelihara kesuburan tanah,pencegah intrusi air laut.

3.Hutan Produksi Yaitu fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Setelah di sahkannya UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Dan UU Cipta Kerja ini menjawab dispute UU41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013 tentang masalah penggunaan tanpa ijin kehutanan di dalam kawasan hutan.didalamnya,ada sinkronisasi norma larangan dalam pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 dengan norma larangan UU nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, sehinga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak ada norma larangan yang tertinggal .UU cipta kerja bisa mengatasi masalah yang sudah cukup panjang sejak disentralisasi big bang dimana ijin-ijin kebun sesuai dengan UU Pemda (1999 dan 2004) diberikan oleh kabupaten dan ternyata berada dalam kawasan hutan tanpa ijin,sehingga menjadi terlanjur. Penyelesaian keterlanjutan kebun kelapa wasit dalam kawasan hutan yang memiliki perizinan (dispute tata ruang).

UU Cipta Kerja juga mengatasi masalah yang selama ini selalu ada yaitu untuk tidak menjadi kriminalisasi dan dapat mengakomodir pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalam dan /atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dikenakan sanksi administrasi. Intinya,petani tidak akan terkena sanksi pidana. Intinya UU cipta kerja mencoba mengatasi keterlanjutan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan . Memang istilah "keterlanjutan"tidak eksplisitdituangkan dalam batang tubuh UU cipta kerja . Namun Dari contoh yang ada pada penjelasan pasal 110 B disebutkan tentang asumsi denda untuk perkebunan sawit akibat keterlanjutan.

Adapun ketentuan dalam UU Cipta Kerja sehubungan dengan keterlanjutan berada dalam pasal 17 A ayat 1 mengenai terhadap orang perorangan yang melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa izin,namun yang bersangkutan bertempat tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus ,maka ia dikenakan sanksi administratif.namun sanksi ini dapat dikecualikan bagi orang -perorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan palingsingkat 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan seperti tercantum dalam pasal17A ayat 2. Dalam pasal 110B ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa memiliki perizinan Berusaha sebelum berlakunya UU cipta kerja ,maka kenakan sanksi administratif berupa: penghentian sementara kegiatan usaha, denda dan/atau paksaan pemerintah.substansi pasal 17 A dan pasal 110 B Khusus tentang "Kegiatan Perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin" adalah sama.hanya saja terhadap petani dalam tidak dalam kawasan paling lama 5 tahun secara terus-menerus,apabila ai sudah terdapat sanksisosial atau sanksi adat, maka ia tidak dikenakan sank administrasi.

Salah Satu indikator yang sangat mungkin dipakai untuk mengidentifikasi bahwa areal kebun sudah terlebih dahulu ditanami sebelum terbitnya UU Cipta Kerja adalah STDB (Surat tanda daftar budidaya) yang terbitkan oleh dinas perkebunan setempat.

Akan Tetapi di dalam UU cipta kerja yang Terdiri 15 Bab dan 174 pasl tidak ada pasal yang mengatur spesifik penyelesaian kebun didalam kawasan hutan.yang menarik adalah aspek perlindungan hukum bagi pekebun /petani sangat terasa apa bila mereka terlanjur berusaha di kawasan hutan,dan pengaturan spesifik penyeleaian kebun dalam kawasan hutan terhadap pada PP No 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi Administrasi di bidang kehutanan.yang salah satunya berisi tentang penyelesaian terhadap perkembangan,perkebunan dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan.

kabupaten pesisir selatan sebagian besar penduduknya berada di sekitar hutan oleh karena itu,guna peningkatan ekonomi,pemerintah mengalokasikan 53.559 hektar kawasan hutan di kabupaten pesisir selatan yang bisa di kelolah oleh masyarakat melalui Sk perhutanan sosial,dan salah satu hutan yang berada di Kecamatan Silaut yang di mana masyarakat di kecamatan silaut banyak yang telah terlanjur berladang di kawasan hutan untuk mendapatkan legalitasnya dengan diterbitkannya Sk kelompok masyarakat untuk sebagian bahan acuan untuk legalitas untuk berladang di kawasan hutan di sekitar kecamatan silaut dengan landasan UUrepublik indonesia No.11tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP No 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi Administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda Administratif di bidang kehutanan.

Kecamatan Silaut merupakan kecamatan yang mekar pada tahun 2012 yang sebelum itu tergabung di dalam kecamatan Lunang Silaut, Kecamatan silaut secara demografi berbatasan dengan perhutanan sosial dan juga berbatasan dengan hutan TNKS, Masyarakat Silaut yang notabennya berprofesi sebagai Petani hingga saat ini banyak Masyarakat Silaut yang berkegiatan Ekonomi di dalam Kawasan Hutan Secara Ilegal sejak dahulu terbentuknya kawasan transmigrasi, Oleh sebab Itu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP No 24 Tahun 2021 untuk membantu Masyarakat yang telah terlanjur berkegiatan Ekonomi di Kawasan hutan secara ilegal menjadi legal dengan dikeluarkannya SK Kelompok petani yang memiliki lahan di dalam kawasan Hutan.

Pemerintah Kecamatan Silaut dengan keluarnya PP No 24 Tahun 2021 ini membantu memfasilitasi masyarakat yang telah terlanjur berkegiatan ekonomi di dalam kawasan Hutan yang dahulunya ilegal atau tidak resmi menjadi Legal atau resmi dengan kegiatan membantuk tim dari seluruh unsur di Kecamatan Silaut lalu mensosialisasi kepada masyarakat tentang PP No 24 Tahun 2021 dan juga memfasilitasi Masyarakat yang ingin mengurus legalitas kebunnya secara langsung melalui PP no 24 tahun 2021.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Memfasilitasi Masyarakat yang telah terlanjur beraktifitas di kawasan Hutan agar Aktifitas Masyarakat Tersebut bisa legal secara Hukum

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Kesejahteraan Masyarakat yang berkebun di kawasan hutan dan legalitas masyarakat yang sudah terlanjur berkegiatan ekonomi selama 5 tahun secara terus menerus di dalam kawasan Hutan Se-Kecamatan Silaut dengan dikeluarkannya SK Kelompok Masyarakat yang Berkebun di Kawasan Hutan

1.13. Hasil Inovasi

Terfasilitasinya masyarakat yang telah terlanjur berladang atau berkebun di dalam kawasan hutan di sekitar Kecamatan Silaut untuk mendapatkan izin atau legalitas dengan di terbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia tentang pemberian persetujuan pengelolaan huta desa kepada kelompok Masyarakat Desa sebagai bahan acuan legalitas Masyarakat untuk berladang di kawasan hutan sekitar kecamatan Silaut

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

02-01-2023

1.15. Waktu Implementasi

01-05-2023

1.16. Anggaran

<https://static2024.tuxedovation.com/a6f6e6347427d7e09d6230d9507a153213aeeab5.pdf>

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Kematangan

87.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/525/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2023
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2024, DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN 2023, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2022
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	GRUP WHATSAPP, GOOGLE EARTH PRO
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	BIMTEK INOVASI KE 1, BIMTEK INOVASI KE 2, BIMTEK INOVASI KE 3, BIMTEK INOVASI KE 4, BIMTEK INOVASI KE 5, BIMTEK INOVASI KE 6

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	MANUAL BOOK TENTANG PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/525/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2023
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	INFORMASI LAYANAN MANUAL, INFORMASI LAYANAN HOTLINE, INFORMASI LAYANAN MEDIA SOSIAL, INFORMASI LAYANAN ONLINE
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 86%	PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	SOP DAN PROPOSAL INOVASI
15.	Layanan Terintegrasi	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan.	PELAYANAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PELAYANAN SATU PINTU PADA PEMERINTAH KECAMATAN SILAUT DAN PEMERINTAH NAGARI SE-KECAMATAN SILAUT
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	PROPOSAL INOVASI
17.	Kemanfaatan Inovasi	Persentase peningkatan Jumlah Unit 20,01% - 50%	KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KECAMATAN SILAUT
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	KLHK Tata Kawasan Hutan Seluas 17.539 Ha di Pesisir Selatan Sumbar
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	VIDEO FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 DI KECAMATAN SILAUT



BUPATI PESISIR SELATAN

Pesisir Selatan, 7 Oktober 2024

Nomor : 400.9.14/111/Bapedalitbang/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Data P3KE**

Yth. Bapak Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
di-

Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menetapkan 16 parameter kemiskinan dan kelas tingkat kemiskinan meliputi ; sangat miskin (miskin ekstrem), miskin dan rentan miskin.

Menindaklanjuti verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/436/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024 menggunakan kriteria sebagaimana keputusan bupati di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 2.170 KK tidak ditemukan kelompok masyarakat yang berada pada kelas tingkat kemiskinan **Sangat Miskin (Miskin Ekstrem)**;
2. Terdapat sebanyak 30 KK yang pindah ke luar Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Terdapat sebanyak 1.024 KK masuk kelompok penduduk **Miskin** dan sebanyak 1.116 KK masuk kelompok penduduk **Rentan Miskin**;
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, maka penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan per bulan Juli 2024 sudah terentaskan menjadi **Nol Persen**;
5. Untuk data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, diucapkan terimakasih.



Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611

Telepon : (0756) 21000 Faksimile (0756) 21200

Laman <https://www.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bupati@pesisirselatankab.go.id

REKAPAN DATA E-PPGBM (D/S) BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Data Tanggal: 2024-09-16 13:53:49

Kecamatan 2024-09-18 13:51:49																														
No	Puskesmas	SASARAN REAL	JUMLAH BALITA DITIBASIS	% D/S	BB/U					TB/U					BB/TB										Stunting	%	Wasting	%	Under weight	%
					Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Outlier	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	%	Overweig ht	Gizi Lebih	Obesitas	%	Outlier						
1	TANJUNG MAKMUR	1.244	1.243	99.92	9	99	1091	44	0	13	51	1176	3	0	4	39	1113	60	2.17	27	20	7	0.6	0	64	5.15	43	3.45	108	8.69
2	TANJUNG BERINGIN	1.691	1.659	99.86	11	95	1498	55	0	19	62	1569	9	0	20	80	1429	98	1.93	32	19	13	0.8	0	81	4.88	100	6.03	106	6.39
3	TAPAN	1.242	1.242	100.00	5	43	1191	3	0	15	21	1206	0	0	1	15	1214	9	0.24	3	2	1	0.1	0	36	2.90	16	1.29	48	3.86
4	RAHUL	1.254	1.243	99.12	20	71	1118	26	8	20	47	1159	6	11	14	33	1121	53	1.05	13	11	2	0.2	9	67	5.39	47	3.78	91	7.32
5	INDRAPURA	1.907	1.906	99.96	14	55	1814	23	0	9	39	1855	2	1	9	46	1799	42	0.47	9	8	1	0.1	1	48	2.52	55	2.89	69	3.52
6	AIR HALI	3.479	3.476	99.91	53	255	3112	56	0	68	207	3183	18	0	16	156	3129	136	1.12	39	29	10	0.3	0	275	7.91	172	4.95	308	8.86
7	BALAI SELASA	2.045	2.045	100.00	20	123	1812	76	14	26	117	1838	13	51	24	96	1649	163	3.13	64	53	11	0.5	49	143	6.99	120	5.87	143	6.99
8	KAMBANG	2.558	2.556	99.92	23	155	2327	51	0	26	102	2398	21	9	27	112	2267	110	1.21	31	25	6	0.2	9	128	5.01	139	5.44	178	6.96
9	KOTO BARU	1.376	1.373	99.78	14	68	1277	14	0	13	26	1333	1	0	14	63	1211	75	0.73	10	10	0	-	0	39	2.84	77	5.61	82	5.97
10	SURANTIH	2.770	2.757	99.53	38	250	2430	39	0	44	168	2537	8	0	5	164	2494	66	1.02	28	24	4	0.1	0	212	7.69	169	6.13	288	10.45
11	PASAR KUCUH	1.480	1.480	100.00	27	203	1209	41	0	37	76	1363	4	0	20	151	1225	65	1.28	19	12	7	0.5	0	113	7.84	171	11.55	230	15.54
12	IV KOTO MUDIK	662	662	100.00	10	62	573	17	0	15	36	611	0	0	6	37	579	29	1.66	11	9	2	0.3	0	51	7.71	43	6.50	72	10.88
13	SALIDO	2.243	2.243	100.00	25	118	2043	57	0	23	64	2145	10	0	12	106	1988	108	1.25	28	26	2	0.1	1	87	3.88	118	5.26	143	6.38
14	LUMPO	914	914	100.00	15	87	775	30	7	19	69	817	1	8	4	42	785	54	2.30	21	17	4	0.4	8	88	9.63	46	5.03	102	11.16
15	KOTO BERAPAK	1.307	1.307	100.00	76	249	953	29	0	65	101	1134	7	0	64	156	996	66	1.91	25	20	5	0.4	0	166	12.70	220	16.83	325	24.87
16	PASAR BARU	1.651	1.645	99.64	8	80	1526	28	3	16	28	1591	7	3	12	58	1522	31	1.16	19	11	8	0.5	3	44	2.67	70	4.26	88	5.35
17	ASAM KUMSANG	458	448	97.82	7	35	402	4	0	8	35	404	1	0	4	22	406	13	0.67	3	3	0	-	0	43	9.81	26	5.80	42	9.38
18	TARUSAN	2.359	2.357	99.92	63	318	1845	131	0	69	279	2009	0	0	24	155	1942	183	2.25	53	43	10	0.4	0	348	14.75	179	7.59	381	16.16
19	BARUNG-BARUNG BELANTAI	1.532	1.526	99.61	16	92	1397	21	0	21	78	1427	0	0	2	61	1369	62	2.10	32	27	5	0.3	0	99	6.49	63	4.13	108	7.08
20	PUSKESMAS AIRPURA	1.573	1.573	100.00	11	51	1479	32	0	10	30	1527	6	0	10	24	1445	80	0.89	14	12	2	0.1	0	40	2.54	34	2.16	62	3.94
21	KAYU GADANG	1.416	1.389	98.09	20	130	1208	25	6	21	106	1254	2	6	18	92	1193	57	1.66	23	17	6	0.4	6	127	9.14	110	7.92	150	10.80
Jumlah		35.131	35.044	99.75	485	2639	31080	802	38	557	1742	32537	119	89	310	1708	30876	1560	1.44	504	398	106	0.3	86	2299	6.56	2018	5.76	3124	8.91
																								TARGET	14%	7%	12%			

Di karahi Oleh
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Agusma Rahmadani, S ST MM
NIP. 19790810 200312 2 006

Painan, Agustus 2024
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan

Apt. FITRIA, S Farm
NIP. 19750203 200501 2 009

**LAPORAN NAGARI YANG MEMILIKI ADMINISTRASI BAIK
TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN**

No	Nama Nagari	Komponen yang dinilai					Jml Nilai
		Perencanaan	Palaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggungjawaban	
1	Sambungo	20	20	15	20	15	90
2	Air Hitam	20	20	15	20	14	89
3	Lubuk Bunta	20	19	15	19	15	88
4	Durian Seribu	20	19	14	19	15	87
5	Pasir Binjai	20	17	15	20	15	87
6	Sungai Sarik	20	19	15	17	15	86
7	Talang Binjai	15	20	15	20	15	85
8	Sungai Sirah	20	19	15	14	15	83
9	Sungai Pulai	20	20	13	13	17	83
10	Silaut	12	12	12	12	12	60

Silaut, 31 Desember 2024

Camat Silaut



AFLIZEN, S.Sos

Penata TK I/III d

NIP. 197206051993031005

DATA P3KE TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAGARI	JUMLAH KPM	OMSPAN	BUREKOL	AUD	SD	SMP	SMA	DISABILITAS	LANSIA	HAMIL	HAM
Silaut	52	30	22	0	28	17	17	4	23	0	0
Sungai Sirah	38	30	8	0	21	17	13	0	9	0	0
Sungai Sarik	22	17	5	1	15	7	4	0	8	0	0
Sungai Pulau	41	25	16	1	12	7	8	2	34	0	0
Pasir Binjai	7	6	1	0	2	2	1	0	4	0	0
Talang Binjai	21	17	4	4	11	2	6	0	6	0	0
Durian Seribu	24	20	14	4	11	3	3	3	21	0	0
Lubuk Bunta	25	17	8	1	9	7	6	0	16	0	0
Air Hitam	59	41	18	1	21	12	9	1	42	0	0
Sambungo	34	31	3	1	23	10	8	1	9	0	0
TOTAL	333	234	99	13	153	84	75	11	172	0	0

REKAP LAPORAN KONFLIK DI KECAMATAN SILAUT TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN	TERLAPOR	JENIS KASUS/ PASAL	LIDIK	SIDIK	P.21	HENTI LIDIK	HENTI SIDIK	HAMBATAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	LP/B/04/I/2024/SPKT/P olsek LunangSilaut/ PolresPesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 23 Januari 2024	INDAH ANGGRAINI, 19 Tahun, Jawa, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Tanjung Makmur Nagari Lubuk Bunta KecamatanSilautKabu patenPesisir Selatan	LANJAR PRASETYO, 18 tahun, Jawa, Petani/Pekebun, Kampung Tanjung Makmur Nagari Lubuk Bunta KecamatanSilautKabu patenPesisir Selatan	ANIRING	-	-	-	1	-	-	MEDIASI	RESTORATIF JUSTICE (RJ)
02.	LP/B/10/IV/2024/SPKT/ Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 19 April 2024	DINI YULIAWATI, 31 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	HARASWANDI Pgl IWAN, 51 tahun, Minang, KaryawanSwasta, KecamatanBatang Kapas KabupatenPesiisr Selatan	CURAT	-	-	-	-	1	-	MEDIASI	SP3
03.	LP/B/16/VI/2024/SPKT/ Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 25 Juni 2024	M. WAHYUDI, 33 tahun, minang, KaryawanSwasta, Kampung Koto Pandan Nagari Inderapura Timur Kec. Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan	TORI, 45 Tahun, caniago, Tani, Kampung Sei. Pulai Nagari Sei. Pulai KecamatanSilautKabu patenPesisir Selatan	PENGANIAYAAN	-	-	-	1	-	-	MEDIASI	RESTORATIF JUSTICE (RJ)
04.	LP/B/19/VIII/2024/SPK T/Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 07 Agustus 2024	HELVIA RIZKI, 40Tahun, Minang, KaryawanHonoror, Kampung lubuk Bunta Nagari Lubuk Bunta Kec. SilautKab. Pesisir Selatan	NODI SUSANTO, 44 tahun, Minang Tani, Kampung lubuk Bunta Nagari Lubuk Bunta Kec. SilautKab. Pesisir Selatan	PENGANCAMAN	-	-	-	1	-	TIDAK CUKUP BUKTI	GELAR PERKAR	HENTI LIDIK

05.	LP/B/22/IX/2024/SPKT/ Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 03 September 2024	ARIF JUMADI, 32 tahun, Minang, Karyawan PT. SJAL 2, Desa Pondok Batu Kelurahan Pondok Batu Kec. Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Sumatera Barat	DEDI CANDRA, 45 Tahun, Minang, Kontaktorangkutanbu ah, Mess Pabrik SJAL Silaut Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat	ANIRING	-	-	-	1	-	-	MEDIASI	RESTORATIF JUSTICE (RJ)
06..	LP/B/27/IX/2024/SPKT/ Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 20 September 2024	JASMULIADI CHAN, 42 tahun, Minang, Swasta,Tanjung Medan Ken. Pancung Soal Kec. Lunang Kab. Pesisir Selatan	ARIF, 30 tahun, Minang, Karyawan PT. SJAL, Kantor Divisi PT. SJAL 2 SilautKecamatanSilau t Kab. Pesisir Selatan	PENGANIAYAAN	-	-	-	1	-	-	MEDIASI	RESTORATIF JUSTICE (RJ)
07.	LP/B/38/XII/2024/SPKT /Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 09 Desember 2024	EDI MARKUAT, 55 tahun, Jawa, Petani/pekebun, Kampung Sungai Limau Nagari Sungai Sarik KecamatanSilautKabu patenPesisir Selatan	JUMADI, 65 tahun, Jawa, Petani/pekebun, Kampung Sungai Serik Nagari Sungai Sarik KecamatanSilautKabu patenPesisir Selatan	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	1	-	-	TIPIRING
08..	LP/B/39/XII/2024/SPKT /Polsek LunangSilaut/PolresP esisir Selatan/Polda Sumatera Barat 10 Desember 2024	HENDRI SYAFRIANTO, 40 tahun, Jawa, Swasta, Kampung Lubuk Bunta Nagari Lubuk Bunta KecamatanSilautKabu patenPesisir Selatan	SUMBARA, 30 tahun, Minang, Petani/pekebun, Lubuk Sanai KecamatanMukomuk oKabupatenPesisir Selatan	CURAT	-	-	-	-	1	-	MEDIASI	SP3

REKAP:

JUMLAH LAPORAN : 8

JUMLAH PENYELESAIAN : 8

PERSENTASE : 100 %